

## Kekerasan Berbasis Gender Online Sebagai Bentuk Delegitimasi Politik Terhadap Politisi Perempuan di Media Sosial Indonesia

Yordanius Yusuf H H<sup>1</sup>, Ika Arinia Indriyany<sup>2</sup>  
Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Korespondensi Email : [6670230032@untirta.ac.id](mailto:6670230032@untirta.ac.id)

### *Abstract*

*The development of digital technology and social media has created new spaces for public participation in social and political discourse. However, digital spaces also present various challenges, one of which is the emergence of online gender-based violence. This phenomenon often targets women who actively participate in digital public spaces, particularly in political and social discussions. This study aims to analyze the forms, dynamics, and implications of online gender-based violence on women's participation in digital public spaces. The research employs a qualitative approach using a literature review method based on relevant academic sources, including scientific journals and previous research publications. The findings indicate that online gender-based violence occurs in various forms, such as hate speech, verbal harassment, personal attacks, and the delegitimization of women's capacities in public discourse. In addition to its psychological impact on victims, such violence also has the potential to limit women's participation in digital public discussions. Therefore, comprehensive efforts are required through stronger regulations, improved digital literacy, and the role of social media platforms in creating safer and more inclusive digital spaces.*

**Keywords:** *online gender-based violence, social media, women's participation*

### *Abstrak*

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan, salah satunya adalah munculnya kekerasan berbasis gender online. Fenomena ini sering kali menargetkan perempuan yang aktif di ruang publik digital, khususnya dalam konteks politik dan isu sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, dinamika, serta implikasi kekerasan berbasis gender online terhadap partisipasi perempuan dalam ruang publik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur terhadap berbagai sumber akademik yang relevan, seperti jurnal ilmiah dan publikasi penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online muncul dalam berbagai bentuk, seperti ujaran kebencian, pelecehan verbal, serangan personal, serta delegitimasi terhadap kapasitas perempuan dalam ruang publik. Selain berdampak pada kondisi psikologis korban, kekerasan tersebut juga berpotensi membatasi partisipasi perempuan dalam diskursus publik digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui regulasi yang lebih kuat,

peningkatan literasi digital, serta peran platform media sosial dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif.

**Kata Kunci:** kekerasan berbasis gender online, media sosial, partisipasi perempuan

## Pendahuluan

Meskipun isu kekerasan berbasis gender online semakin mendapat perhatian dalam penelitian akademik, sebagian besar kajian yang telah ada masih lebih banyak membahas kekerasan digital dari perspektif sosial, komunikasi, maupun perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian Ayunda Pratiwi et al. (2021) misalnya, lebih menyoroti pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender online serta dampak yang ditimbulkan dalam ruang digital. Sementara itu, penelitian Fidella Azhar Julian dan Wa Ode Asmawati (2024) menekankan bagaimana media sosial menjadi ruang yang memperlihatkan meningkatnya kerentanan perempuan terhadap serangan misoginis di era digital. Penelitian lain yang dilakukan Eka Susilowati et al. (2025) lebih berfokus pada penggunaan metafora kekerasan verbal terhadap politisi perempuan di media sosial X sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam komunikasi digital. Selain itu, penelitian Delisle et al. (2019) menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam politik memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap serangan digital dibandingkan laki-laki, terutama dalam bentuk pelecehan seksual, ancaman, dan ujaran kebencian berbasis gender. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender online telah menjadi persoalan yang semakin kompleks dalam ruang publik digital.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih menempatkan kekerasan berbasis gender online sebagai persoalan etika komunikasi digital, perlindungan korban, maupun dampak psikologis terhadap perempuan. Kajian yang secara khusus membahas hubungan antara kekerasan digital dengan proses delegitimasi politik terhadap perempuan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti bentuk kekerasan, pengalaman korban, serta pola komunikasi misoginis di media sosial tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika legitimasi politik dalam ruang publik digital. Padahal, dalam konteks politik digital, serangan berbasis gender tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen politik untuk membangun persepsi publik yang negatif terhadap kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Narasi yang muncul melalui komentar seksis, stereotip gender, maupun pelecehan verbal dapat mempengaruhi legitimasi perempuan dalam arena politik serta memperkuat dominasi maskulin dalam ruang kekuasaan digital.

Selain itu, perkembangan media sosial juga telah mengubah cara legitimasi politik diproduksi dan dipertarungkan dalam masyarakat. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi politik, tetapi juga menjadi arena pertarungan simbolik yang memungkinkan berbagai aktor politik membentuk opini publik secara cepat dan luas. Dalam kondisi tersebut, perempuan politisi menjadi kelompok yang rentan mengalami serangan berbasis gender yang bertujuan melemahkan citra,

kredibilitas, dan posisi politik mereka di mata publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online memiliki dimensi politik yang lebih luas dibandingkan sekadar persoalan komunikasi digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu melihat kekerasan berbasis gender online tidak hanya sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dan politik dalam mempertahankan relasi kuasa patriarki di ruang publik digital.

Penelitian ini berupaya melihat bagaimana kekerasan berbasis gender online bekerja sebagai bagian dari proses delegitimasi politik terhadap perempuan di media sosial Indonesia. Fokus penelitian tidak hanya terletak pada bentuk-bentuk kekerasan digital yang muncul, tetapi juga pada bagaimana narasi misoginis, stereotip gender, dan serangan simbolik digunakan untuk membangun persepsi negatif terhadap perempuan dalam politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kekerasan digital, relasi kuasa patriarki, dan dinamika politik digital dalam ruang publik media sosial di Indonesia.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk memahami fenomena kekerasan berbasis gender online sebagai bentuk delegitimasi politik terhadap politisi perempuan di media sosial Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam makna, pengalaman, serta konteks sosial dari suatu fenomena melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh peneliti (Creswell, 2014). Objek penelitian difokuskan pada interaksi dan konten komunikasi di media sosial yang memuat komentar, unggahan, maupun respons publik terhadap politisi perempuan di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa unggahan dan komentar pengguna media sosial serta data sekunder yang berasal dari literatur akademik dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada praktik kekerasan berbasis gender online yang muncul dalam bentuk ujaran seksis, stereotip gender, pelecehan verbal, serta serangan yang menargetkan identitas gender perempuan dalam diskursus digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital dan dokumentasi terhadap konten media sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola narasi kekerasan berbasis gender dalam media sosial. Proses analisis tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana kekerasan berbasis gender online digunakan sebagai strategi delegitimasi politik terhadap politisi perempuan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kekerasan berbasis gender online dalam konteks politik digital di Indonesia (Creswell, 2014).

## Hasil dan Diskusi

Fenomena kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan di ruang digital Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan berkembangnya penggunaan internet dan media sosial. Ruang digital yang pada awalnya dianggap sebagai medium demokratis untuk memperluas partisipasi publik ternyata juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan baru terhadap perempuan. Kekerasan tersebut dapat berupa komentar seksis, pelecehan verbal, ancaman, hingga penyebaran konten yang merendahkan martabat perempuan. Dalam konteks politik, perempuan yang tampil di ruang publik digital sering menjadi sasaran serangan yang tidak berkaitan langsung dengan gagasan politik yang mereka sampaikan. Serangan tersebut justru lebih banyak menargetkan identitas gender dan kehidupan personal perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa berbasis gender masih terus direproduksi dalam ruang digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi politik, tetapi juga arena reproduksi ketimpangan gender dalam masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komentar terhadap politisi perempuan di media sosial sering kali mengandung stereotip gender yang merendahkan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan politik. Dalam banyak percakapan digital, perempuan politisi digambarkan sebagai sosok yang emosional, lemah, dan tidak rasional dalam mengambil keputusan politik. Narasi semacam ini menunjukkan bahwa stereotip gender masih menjadi dasar dalam menilai kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Kritik terhadap politisi perempuan sering kali tidak berfokus pada substansi kebijakan atau gagasan politik yang mereka sampaikan. Sebaliknya, kritik tersebut lebih banyak diarahkan pada aspek personal dan identitas gender perempuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan dalam politik menghadapi standar penilaian yang berbeda dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, kekerasan berbasis gender online dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam ruang politik.

Selain stereotip gender, bentuk kekerasan lain yang sering muncul dalam diskursus digital adalah objektifikasi terhadap tubuh perempuan politisi. Banyak komentar di media sosial yang menilai perempuan politisi berdasarkan penampilan fisik mereka daripada kinerja politik yang dilakukan. Komentar semacam ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan sering dijadikan objek penilaian dalam ruang publik digital. Objektifikasi tersebut menggeser diskursus politik dari pembahasan kebijakan menuju aspek personal yang bersifat gendered. Dalam beberapa kasus, komentar yang muncul bahkan mengandung unsur pelecehan seksual secara verbal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tubuh perempuan masih dipandang sebagai objek yang dapat dikomentari secara bebas dalam ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online tidak dapat dipisahkan dari budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online sering kali muncul dalam bentuk ancaman dan intimidasi terhadap perempuan yang aktif di ruang publik digital. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga intimidasi terhadap kehidupan pribadi korban. Meskipun sebagian ancaman tersebut tidak selalu diwujudkan secara nyata, keberadaannya tetap memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Ancaman di ruang digital dapat menciptakan rasa takut yang membuat perempuan lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini politik di ruang publik. Kondisi ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi perempuan dalam diskursus politik digital. Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat menyebabkan perempuan menarik diri dari ruang publik digital. Oleh karena itu, kekerasan digital memiliki implikasi serius terhadap partisipasi perempuan dalam politik (Rahadian, Indriasari, & Kurniawan, 2025).

Fenomena kekerasan berbasis gender online juga berkaitan erat dengan struktur sosial patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam ruang publik, termasuk dalam bidang politik. Ketika perempuan mencoba memasuki ruang politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki, mereka sering menghadapi berbagai bentuk resistensi sosial. Resistensi tersebut dapat muncul dalam bentuk kritik personal, pelecehan verbal, maupun komentar yang merendahkan kapasitas perempuan. Media sosial kemudian menjadi ruang baru di mana resistensi tersebut dapat diekspresikan secara terbuka. Dengan kata lain, kekerasan digital terhadap perempuan merupakan refleksi dari struktur sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak otomatis menghilangkan ketimpangan gender dalam masyarakat (Hamdy & Hamdy, 2023).

Dalam konteks politik digital, kekerasan berbasis gender online juga dapat dipahami sebagai bentuk delegitimasi terhadap perempuan politisi. Delegitimasi ini terjadi ketika serangan terhadap perempuan tidak lagi berkaitan dengan kapasitas politik, tetapi lebih menyoroti identitas gender mereka. Serangan semacam ini dapat merusak citra politik perempuan di mata publik. Narasi yang dibangun melalui komentar seksis dan misoginis dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang perempuan sebagai pemimpin. Akibatnya, legitimasi politik perempuan dapat terkikis oleh konstruksi sosial yang bias gender. Dengan demikian, kekerasan digital tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada posisi politik perempuan secara struktural. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online memiliki dimensi politik yang penting untuk dianalisis (Asriani, 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika algoritma media sosial turut memperkuat penyebaran kekerasan berbasis gender online. Komentar yang bersifat provokatif dan kontroversial cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dan interaksi dari pengguna lain. Akibatnya, komentar yang mengandung ujaran kebencian atau seksisme dapat dengan mudah menyebar secara luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur teknologi digital juga berperan dalam memperkuat kekerasan berbasis gender. Media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga arena di mana

konflik simbolik dapat diperbesar melalui mekanisme algoritmik. Kondisi ini membuat perempuan yang aktif di ruang publik digital menjadi lebih rentan terhadap serangan. Dengan demikian, kekerasan berbasis gender online tidak dapat dipisahkan dari dinamika teknologi media sosial itu sendiri (Andiyansari & Juwono, 2023).

Dalam diskursus politik digital di Indonesia, kekerasan berbasis gender online juga sering kali berkaitan dengan polarisasi politik yang terjadi di masyarakat. Ketika terjadi perdebatan politik yang intens di media sosial, perempuan politisi sering menjadi target serangan yang lebih personal dibandingkan politisi laki-laki. Serangan tersebut tidak hanya menargetkan posisi politik mereka tetapi juga identitas gender mereka. Hal ini menunjukkan bahwa gender sering dijadikan alat untuk memperkuat serangan politik dalam ruang digital. Dengan memanfaatkan stereotip gender, pihak tertentu dapat mencoba merusak reputasi politik perempuan. Strategi ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online dapat digunakan sebagai instrumen politik. Dengan kata lain, serangan digital tersebut memiliki dimensi strategis dalam kontestasi kekuasaan (Pratiwi, Mirzana, & Muin, 2023).

Selain dalam bentuk komentar langsung, kekerasan berbasis gender online juga sering muncul melalui meme, satire, dan humor digital yang merendahkan perempuan. Humor seksis sering digunakan untuk mengkritik perempuan politisi dengan cara yang tampak ringan tetapi memiliki makna diskriminatif. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk hiburan, humor semacam ini dapat memperkuat stereotip gender dalam masyarakat. Ketika narasi tersebut terus diulang dalam ruang digital, masyarakat dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Akibatnya, diskriminasi terhadap perempuan dalam politik menjadi semakin terlegitimasi secara sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan simbolik dapat berlangsung melalui praktik komunikasi sehari-hari di media sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap bahasa dan simbol dalam media sosial menjadi penting dalam memahami dinamika kekerasan digital (Asriani, 2023).

Dari sisi pengalaman korban, kekerasan berbasis gender online juga memiliki dampak psikologis yang cukup serius bagi perempuan yang aktif di ruang publik digital. Banyak korban melaporkan mengalami tekanan emosional, kecemasan, dan stres akibat serangan yang mereka terima di media sosial. Dampak psikologis ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri perempuan dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik. Dalam beberapa kasus, korban bahkan memilih untuk membatasi aktivitas mereka di media sosial demi menghindari serangan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan digital tidak hanya berdampak pada citra publik tetapi juga pada kondisi mental korban. Ketika perempuan merasa tidak aman di ruang digital, partisipasi mereka dalam diskursus publik dapat menurun. Kondisi ini tentu merugikan proses demokrasi yang membutuhkan partisipasi politik yang inklusif (Rahadian et al., 2025).

Selain berdampak pada individu, kekerasan berbasis gender online juga memiliki implikasi terhadap representasi politik perempuan secara kolektif. Ketika perempuan

politisi terus menerus menjadi target serangan berbasis gender, hal ini dapat membentuk persepsi publik bahwa perempuan tidak cocok untuk memimpin. Persepsi semacam ini dapat mempengaruhi cara masyarakat memilih pemimpin dalam proses demokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Padahal, representasi perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam demokrasi yang inklusif. Jika kekerasan digital terus dibiarkan, maka kesenjangan gender dalam politik dapat semakin melebar. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dipahami sebagai masalah struktural dalam sistem politik (Susilo et al., 2019).

Dalam perspektif kajian gender, kekerasan berbasis gender online juga dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perempuan yang memasuki ruang publik. Ketika perempuan berusaha mengambil peran dalam politik, mereka sering dianggap melanggar norma gender tradisional yang menempatkan perempuan dalam ruang domestik. Serangan digital kemudian digunakan sebagai cara untuk mengingatkan perempuan agar kembali pada peran sosial yang dianggap "sesuai". Dengan demikian, kekerasan digital tidak hanya berkaitan dengan konflik individu tetapi juga dengan upaya mempertahankan norma sosial patriarkal. Media sosial menjadi arena baru di mana kontrol sosial tersebut dapat dijalankan secara terbuka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat mereproduksi norma sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itu, analisis terhadap kekerasan digital perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang lebih luas (Hamdy & Hamdy, 2023).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender online masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang berkaitan dengan kekerasan digital, implementasinya masih belum sepenuhnya efektif. Banyak korban yang enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena khawatir akan stigma sosial atau proses hukum yang panjang. Selain itu, mekanisme moderasi konten di platform media sosial juga sering kali belum mampu menangani komentar yang bersifat misoginis secara cepat. Akibatnya, banyak komentar yang merendahkan perempuan tetap dapat beredar di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan digital masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam mengatasi masalah ini (Pratiwi et al., 2023).

Selain regulasi, literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengurangi kekerasan berbasis gender online. Banyak pengguna media sosial yang belum sepenuhnya memahami dampak dari komentar yang mereka tulis di ruang digital. Kurangnya kesadaran mengenai isu gender sering kali membuat komentar seksis dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal, komentar semacam itu dapat memiliki dampak sosial yang luas terhadap korban. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran gender menjadi langkah penting dalam mengatasi kekerasan digital.

Pendidikan mengenai etika komunikasi digital perlu diperkuat dalam berbagai sektor masyarakat. Dengan demikian, ruang digital dapat berkembang menjadi ruang yang lebih inklusif dan menghargai kesetaraan gender (Andiyansari & Juwono, 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dimensi sosial, budaya, serta politik. Serangan digital terhadap perempuan politisi tidak hanya berkaitan dengan individu tetapi juga dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Kekerasan tersebut sering kali digunakan sebagai alat untuk melemahkan legitimasi politik perempuan di ruang publik. Dalam konteks demokrasi digital, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi arena pertarungan simbolik yang mempengaruhi legitimasi politik. Oleh karena itu, memahami dinamika kekerasan berbasis gender online menjadi penting dalam upaya memperkuat demokrasi yang lebih setara. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam ruang digital merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Dengan demikian, ruang politik digital perlu dikelola secara lebih inklusif agar dapat mendukung partisipasi perempuan secara adil dan setara (Asriani, 2023).

Tabel.1 Klasifikasi Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Politisi Perempuan

Kategori Kekerasan	Bentuk Serangan di Media Sosial	Contoh Narasi yang Muncul	Dampak terhadap Politisi Perempuan
Seksisme verbal	Komentar merendahkan kemampuan perempuan	"Perempuan tidak. Cocok memimpin", terlalu emosional. Untuk politik"	Merusak legitimasi kepemimpinan perempuan
Objektifikasi tubuh	Komentar terkait penampilan fisik	Menilai tubuh, wajah, atau Standar kecantikan	Mengalihkan diskursus dari substansi politik
Pelecehan seksual digital	Komentar bernuansa seksual	Candaan seksual, pelecehan verbal	Merendahkan martabat perempuan
Ancaman dan intimidasi	Ancaman kekerasan atau pelecehan	Ancaman terhadap tubuh atau keselamatan	Menimbulkan rasa takut di ruang digital
Delegitimasi politik	Narasi bahwa perempuan tidak pantas memimpin	"Kembali saja ke urusan rumah tangga"	Mengurangi kredibilitas politik perempuan

Sumber: Hasil olahan data peneliti (2026).

Tabel ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berfungsi sebagai strategi delegitimasi politik terhadap perempuan di ruang digital.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan dalam politik sering menghadapi *gendered disinformation* dan serangan misoginis yang bertujuan merusak legitimasi politik mereka (Krook & Restrepo Sanín, 2020).

Untuk memperkuat analisis, fenomena kekerasan berbasis gender online juga dapat dilihat dari beberapa kasus yang melibatkan perempuan di ruang publik Indonesia. Salah satu contoh adalah serangan digital yang sering diarahkan kepada **Puan Maharani** sebagai politisi perempuan yang menempati posisi strategis dalam politik nasional. Dalam berbagai diskursus di media sosial, kritik terhadap Puan Maharani sering kali tidak hanya berfokus pada kebijakan politik yang diambilnya, tetapi juga pada aspek personal seperti penampilan, ekspresi wajah, maupun stereotip terhadap perempuan dalam kepemimpinan. Serangan semacam ini menunjukkan bahwa perempuan politisi sering dinilai berdasarkan standar gender yang berbeda dibandingkan politisi laki-laki.

Contoh lain dapat dilihat pada pengalaman **Grace Natalie**, yang sebagai pemimpin partai politik juga sering menerima komentar seksis di media sosial. Dalam berbagai percakapan digital, kritik terhadap Grace Natalie sering kali disertai narasi yang mempertanyakan kapasitas perempuan dalam memimpin organisasi politik. Narasi tersebut memperlihatkan bahwa gender sering digunakan sebagai alat untuk melemahkan legitimasi politik perempuan.

Selain itu, jurnalis dan figur publik seperti **Najwa Shihab** juga kerap mengalami serangan misoginis ketika menyampaikan kritik politik di media sosial. Komentar yang muncul tidak jarang mengandung pelecehan verbal maupun stereotip gender. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan yang aktif dalam diskursus politik digital memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis gender online.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa **ruang digital sering menjadi arena pertarungan simbolik** di mana legitimasi politik perempuan dapat diproduksi maupun diperdebatkan melalui bahasa dan narasi yang beredar di media sosial.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan berbagai studi internasional mengenai kekerasan digital terhadap perempuan dalam politik. Penelitian oleh Mona Lena Krook dan Juliana Restrepo Sanín menunjukkan bahwa perempuan politisi di berbagai negara sering menjadi target **gendered political violence**, yaitu bentuk kekerasan yang secara khusus menargetkan perempuan karena identitas gender mereka. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk serangan digital yang bertujuan merusak reputasi politik perempuan.

Studi lain yang dilakukan oleh Deborah Tannen menunjukkan bahwa bahasa dalam komunikasi publik sering kali mencerminkan relasi kuasa dalam masyarakat. Dalam konteks media sosial, bahasa yang merendahkan perempuan dapat membentuk persepsi

publik mengenai kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Ketika narasi tersebut terus berulang dalam ruang digital, stereotip gender dapat semakin menguat.

Selain itu, penelitian oleh Emma A. Jane juga menemukan bahwa perempuan yang aktif di ruang digital memiliki kemungkinan lebih besar menjadi target pelecehan berbasis gender dibandingkan laki-laki. Kekerasan tersebut sering kali bersifat seksual, misoginis, dan menyerang identitas personal korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya bebas dari ketimpangan gender yang ada dalam masyarakat.

Dalam konteks politik, penelitian oleh Diana Z. O'Brien menunjukkan bahwa serangan berbasis gender terhadap perempuan politisi dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai kompetensi kepemimpinan perempuan. Akibatnya, kekerasan digital tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada peluang perempuan untuk mendapatkan dukungan politik dalam sistem demokrasi.

#### Delegitimasi Politik Perempuan Melalui Kekerasan Berbasis Gender Online



Model ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi politik, tetapi juga menjadi arena pertarungan simbolik yang dapat mempengaruhi legitimasi politik perempuan. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian oleh Mona Lena Krook yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik sering digunakan untuk membatasi atau menghalangi partisipasi perempuan dalam kekuasaan politik.

Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang komunikasi politik yang lebih terbuka dan interaktif dibandingkan dengan media konvensional. Politisi kini dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat tanpa melalui perantara media massa. Namun keterbukaan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya potensi konflik dan kekerasan verbal dalam ruang digital. Dalam konteks ini, perempuan yang aktif dalam diskursus politik sering menjadi sasaran serangan yang bersifat personal dan berbasis gender. Serangan tersebut sering kali muncul dalam bentuk komentar yang merendahkan kemampuan perempuan dalam memimpin. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya bebas dari bias gender yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, media sosial dapat berfungsi sebagai ruang reproduksi ketimpangan gender dalam politik (Krook & Restrepo Sanín, 2020).

Selain serangan verbal langsung, kekerasan berbasis gender online juga sering muncul melalui praktik penyebaran narasi yang merendahkan perempuan secara sistematis. Narasi tersebut dapat berbentuk rumor, meme, maupun konten yang sengaja dibuat untuk merusak reputasi perempuan politisi. Dalam banyak kasus, narasi tersebut menysar kehidupan pribadi perempuan dan tidak berkaitan dengan kapasitas politik mereka. Strategi semacam ini sering digunakan untuk membangun persepsi negatif terhadap perempuan dalam politik. Ketika narasi tersebut terus beredar di ruang digital, masyarakat dapat menganggapnya sebagai fakta yang benar. Akibatnya, legitimasi politik perempuan dapat terkikis secara perlahan melalui konstruksi opini publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki dimensi simbolik yang sangat kuat dalam politik (Sobieraj, 2020).

Dalam konteks demokrasi digital, kekerasan berbasis gender online juga dapat mempengaruhi kualitas diskursus politik di ruang publik. Diskursus politik yang seharusnya berfokus pada perdebatan gagasan dan kebijakan sering kali berubah menjadi serangan personal terhadap individu tertentu. Ketika perempuan menjadi target utama serangan tersebut, ruang diskursus politik menjadi semakin tidak ramah bagi perempuan. Kondisi ini dapat menghambat partisipasi perempuan dalam proses politik yang seharusnya inklusif. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang setara dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Oleh karena itu, keberadaan kekerasan digital dapat menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya merupakan masalah individu tetapi juga masalah struktural dalam sistem politik (Jane, 2017).

Selain berdampak pada kualitas diskursus politik, kekerasan berbasis gender online juga berpotensi mempengaruhi perilaku politik perempuan. Perempuan yang sering mengalami serangan digital dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan memilih untuk membatasi aktivitas mereka di media sosial untuk menghindari serangan lanjutan. Fenomena ini dikenal sebagai **self-censorship**, yaitu ketika individu secara sadar membatasi ekspresi diri karena takut terhadap konsekuensi sosial. Self-censorship dapat mengurangi keberagaman perspektif dalam diskursus politik digital. Akibatnya, ruang

publik digital menjadi semakin didominasi oleh kelompok tertentu. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi yang inklusif (Mantilla, 2015).

Fenomena kekerasan berbasis gender online juga memperlihatkan bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat kekuasaan dalam politik. Bahasa yang merendahkan perempuan dapat membentuk cara masyarakat memandang perempuan dalam ruang publik. Ketika bahasa yang diskriminatif terus digunakan dalam media sosial, narasi tersebut dapat memperkuat stereotip gender dalam masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat dominasi sosial. Analisis terhadap bahasa yang digunakan dalam komentar digital menjadi penting untuk memahami dinamika kekerasan berbasis gender. Melalui bahasa, individu atau kelompok tertentu dapat menciptakan konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, studi mengenai bahasa digital menjadi relevan dalam kajian politik dan gender (Southern & Harmer, 2019).

Selain faktor budaya patriarki, struktur teknologi media sosial juga turut mempengaruhi dinamika kekerasan berbasis gender online. Algoritma media sosial dirancang untuk mempromosikan konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi. Konten yang bersifat kontroversial atau provokatif sering kali mendapatkan lebih banyak perhatian dari pengguna lain. Akibatnya, komentar yang mengandung ujaran kebencian atau seksisme dapat dengan mudah menyebar secara luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperkuat konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks politik, kondisi tersebut dapat meningkatkan intensitas serangan terhadap perempuan politisi. Dengan demikian, kekerasan berbasis gender online tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial tetapi juga oleh faktor teknologi (Rheault, Rayment, & Musulan, 2019).

Lebih jauh lagi, kekerasan berbasis gender online juga dapat mempengaruhi proses rekrutmen politik perempuan. Perempuan yang menyaksikan banyaknya serangan digital terhadap politisi perempuan mungkin menjadi ragu untuk terlibat dalam politik. Ketakutan terhadap potensi serangan digital dapat menjadi salah satu hambatan psikologis bagi perempuan untuk memasuki dunia politik. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki efek jangka panjang terhadap representasi politik perempuan. Jika fenomena ini terus berlangsung, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dapat mengalami hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender online perlu dipahami sebagai bagian dari tantangan struktural dalam demokrasi modern. Upaya untuk mengatasi fenomena ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aktor sosial (Krook, 2017).

Fenomena kekerasan berbasis gender online semakin mendapat perhatian dalam berbagai penelitian akademik di Indonesia. Kekerasan ini sering muncul dalam bentuk komentar seksis, penghinaan berbasis gender, hingga pelecehan seksual verbal di media sosial. Perempuan yang aktif di ruang digital cenderung mengalami bentuk kekerasan yang menargetkan identitas gender mereka secara langsung. Hal ini menunjukkan

bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral dari bias sosial yang ada dalam masyarakat. Kekerasan berbasis gender online sering kali dipengaruhi oleh struktur patriarki yang masih kuat dalam budaya sosial. Struktur tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap serangan simbolik maupun verbal. Dalam konteks politik, situasi ini membuat perempuan politisi menghadapi tantangan tambahan ketika berpartisipasi dalam ruang publik digital. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan digital terhadap perempuan dapat memperkuat ketimpangan gender dalam ruang publik (Julian & Asmawati, 2023).

Penelitian lain menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya berupa serangan verbal tetapi juga dapat berbentuk intimidasi dan ancaman digital. Ancaman tersebut dapat menciptakan rasa takut yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam ruang publik digital. Dalam beberapa kasus, perempuan yang mengalami serangan digital memilih untuk mengurangi aktivitas mereka di media sosial. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya partisipasi perempuan dalam diskursus publik. Ketika perempuan menarik diri dari ruang digital, maka suara perempuan dalam debat publik juga menjadi semakin terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki implikasi serius terhadap demokrasi digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan di ruang digital menjadi isu penting dalam kajian gender dan politik. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban KBGO menegaskan bahwa kekerasan digital dapat menyebabkan trauma psikologis dan tekanan sosial bagi korban (Arawinda, 2021).

Selain ancaman langsung, kekerasan berbasis gender online juga sering muncul dalam bentuk kekerasan simbolik melalui bahasa dan narasi yang merendahkan perempuan. Bahasa yang digunakan dalam komentar digital dapat mencerminkan relasi kuasa dalam masyarakat. Komentar yang merendahkan perempuan sering kali memperkuat stereotip gender yang sudah ada sebelumnya. Ketika stereotip tersebut terus diulang dalam ruang digital, masyarakat dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Akibatnya, diskriminasi terhadap perempuan dalam ruang publik menjadi semakin terlegitimasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan simbolik dapat berlangsung melalui praktik komunikasi sehari-hari di media sosial. Analisis wacana menunjukkan bahwa narasi tertentu dapat membentuk cara masyarakat memandang perempuan. Dengan demikian, kekerasan simbolik menjadi bagian dari mekanisme sosial yang mempertahankan ketimpangan gender (Elanda & Pitaloka, 2022).

Dalam konteks penggunaan media sosial yang semakin luas, kekerasan berbasis gender online juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan internet berbanding lurus dengan meningkatnya potensi kekerasan digital. Selama pandemi COVID-19 misalnya, aktivitas masyarakat di ruang digital meningkat drastis. Kondisi tersebut juga menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah laporan kasus kekerasan digital terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi

lingkungan yang tidak aman bagi perempuan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika kekerasan digital dalam konteks sosial yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada (Hayati, 2021).

Penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online sering kali melibatkan praktik *victim blaming* terhadap perempuan korban. *Victim blaming* terjadi ketika masyarakat justru menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami. Dalam konteks media online, pemberitaan maupun komentar publik sering menggiring opini yang menyudutkan perempuan korban. Narasi semacam ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan mereka. Selain itu, *victim blaming* juga dapat membuat korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan digital tidak tercatat secara resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online tidak hanya terjadi dalam bentuk serangan langsung tetapi juga melalui konstruksi sosial yang menyalahkan korban. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sensitif gender diperlukan dalam menangani kasus kekerasan digital (Ihsani, 2020).

Penelitian lain menunjukkan bahwa bentuk kekerasan berbasis gender online sangat beragam, mulai dari *cyber harassment* hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Praktik ini sering dikenal sebagai *non-consensual dissemination of intimate images (NCII)*. Penyebaran konten intim tanpa izin merupakan salah satu bentuk kekerasan digital yang paling merugikan korban. Korban sering mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, dan kerusakan reputasi. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling sering menjadi korban praktik ini. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan berbasis gender. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki dimensi yang sangat kompleks. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban menjadi sangat penting (Ramadhan et al., 2025).

Kekerasan berbasis gender online juga memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Banyak korban melaporkan mengalami stres, kecemasan, dan rasa takut setelah mengalami serangan digital. Dampak psikologis ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial maupun profesional korban. Dalam konteks politik, dampak tersebut dapat mempengaruhi keberanian perempuan untuk terlibat dalam diskursus publik. Ketika perempuan merasa tidak aman di ruang digital, mereka cenderung membatasi aktivitas politik mereka di media sosial. Kondisi ini dapat mengurangi keberagaman perspektif dalam diskursus politik digital. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang setara dari semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan digital terhadap perempuan dapat menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi (Samosir, 2023).

Selain dampak psikologis, kekerasan berbasis gender online juga dapat berdampak pada citra publik perempuan yang menjadi korban. Serangan digital yang berulang dapat membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap korban. Persepsi tersebut sering

kali tidak berkaitan dengan fakta yang sebenarnya. Dalam konteks politik, kondisi ini dapat merusak reputasi perempuan politisi di mata publik. Serangan digital sering kali digunakan sebagai strategi untuk mendeligitisasi posisi politik perempuan. Dengan merusak citra publik perempuan, pelaku dapat mencoba melemahkan pengaruh politik mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan digital dapat digunakan sebagai alat dalam kontestasi kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kekerasan digital sebagai fenomena politik (Moulita, Mazdalifah, & Lubis, 2023).

Fenomena kekerasan digital terhadap perempuan juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam cara masyarakat menilai laki-laki dan perempuan di ruang publik. Perempuan sering dinilai berdasarkan standar sosial yang berbeda dibandingkan laki-laki. Kritik terhadap perempuan sering kali lebih bersifat personal dan emosional. Hal ini berbeda dengan kritik terhadap laki-laki yang lebih sering berfokus pada aspek kebijakan atau kompetensi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa bias gender masih sangat kuat dalam diskursus publik. Ketika bias tersebut muncul dalam media sosial, dampaknya dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, media sosial dapat memperkuat reproduksi stereotip gender dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak selalu bersifat netral dalam praktik sosial (Julian & Asmawati, 2023).

Kekerasan berbasis gender online juga berkaitan erat dengan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam ruang publik. Ketika perempuan memasuki ruang politik, mereka sering menghadapi berbagai bentuk resistensi sosial. Resistensi tersebut dapat muncul dalam bentuk komentar yang merendahkan kemampuan perempuan. Media sosial kemudian menjadi ruang baru di mana resistensi tersebut dapat diekspresikan secara terbuka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan digital merupakan manifestasi dari struktur sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan struktural diperlukan untuk memahami dinamika kekerasan berbasis gender online. Analisis semacam ini penting untuk mengidentifikasi akar masalah yang mendasari kekerasan digital (Hayati, 2021).

Selain faktor budaya, faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam penyebaran kekerasan berbasis gender online. Algoritma media sosial sering kali mempromosikan konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi. Konten yang bersifat kontroversial atau provokatif cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian. Akibatnya, komentar yang mengandung ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar secara luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperkuat konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks gender, kondisi ini dapat meningkatkan intensitas serangan terhadap perempuan di ruang digital. Oleh karena itu, platform media sosial perlu memiliki mekanisme moderasi yang lebih efektif. Upaya tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi perempuan (Arawinda, 2021).

Kekerasan berbasis gender online juga menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi arena pertarungan simbolik dalam politik. Dalam arena tersebut, berbagai aktor

politik berusaha membangun narasi yang menguntungkan posisi mereka. Serangan berbasis gender dapat digunakan untuk melemahkan legitimasi politik perempuan. Narasi yang merendahkan perempuan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan. Ketika narasi tersebut terus beredar, masyarakat dapat mulai meragukan kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan digital memiliki dimensi politik yang sangat penting. Oleh karena itu, analisis terhadap kekerasan digital perlu mempertimbangkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dengan memahami dimensi politik tersebut, kita dapat melihat bagaimana kekerasan digital digunakan sebagai strategi delegitimasi politik (Moulita et al., 2023).

Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kekerasan berbasis gender online. Literasi digital membantu masyarakat memahami dampak dari perilaku mereka di ruang digital. Dengan literasi yang lebih baik, pengguna media sosial dapat lebih sadar terhadap konsekuensi dari komentar yang mereka tulis. Selain itu, literasi digital juga dapat membantu korban memahami hak-hak mereka dalam menghadapi kekerasan digital. Pendidikan mengenai kesetaraan gender juga menjadi bagian penting dari literasi digital. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu gender, kekerasan berbasis gender online dapat diminimalkan. Oleh karena itu, literasi digital perlu menjadi bagian dari kebijakan pendidikan yang lebih luas. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih inklusif (Ihsani, 2020).

Selain pendidikan, peran regulasi juga sangat penting dalam mengatasi kekerasan berbasis gender online. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang jelas dalam melindungi korban kekerasan digital. Regulasi tersebut harus mampu mengatur tanggung jawab platform media sosial dalam menangani konten yang bersifat diskriminatif. Selain itu, sistem pelaporan yang mudah dan efektif juga perlu disediakan bagi korban. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang kuat, korban dapat merasa lebih aman dalam melaporkan kasus yang mereka alami. Regulasi yang efektif juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan digital. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman. Pendekatan kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi fenomena ini (Nazar, Anugrah, & Pramudia, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Kekerasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu tetapi juga dengan struktur sosial, budaya, dan teknologi. Dalam konteks politik digital, kekerasan berbasis gender online dapat digunakan sebagai alat untuk melemahkan legitimasi politik perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi arena pertarungan simbolik yang mempengaruhi persepsi publik terhadap perempuan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kekerasan digital memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan tersebut harus melibatkan aspek hukum, pendidikan, teknologi, dan

budaya. Dengan demikian, ruang digital dapat berkembang menjadi ruang publik yang lebih inklusif dan setara gender (Julian & Asmawati, 2023).

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan fenomena yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam ruang publik digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan yang aktif dalam ruang digital, terutama dalam diskursus politik dan sosial, lebih rentan mengalami serangan verbal, pelecehan berbasis gender, hingga delegitimasi identitas personal. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk ujaran kebencian, tetapi juga melalui narasi simbolik yang merendahkan kapasitas perempuan dalam ruang publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral, melainkan mereproduksi relasi kuasa dan bias gender yang telah lama ada dalam struktur sosial masyarakat. Kekerasan berbasis gender online juga menunjukkan adanya keterkaitan antara budaya patriarki, dinamika politik digital, serta perkembangan teknologi komunikasi. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam ruang publik digital. Serangan yang bersifat personal dan berulang dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban, seperti meningkatnya rasa takut, kecemasan, serta tekanan sosial. Dampak tersebut berpotensi membuat perempuan mengurangi aktivitas mereka dalam diskursus publik digital. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka representasi perspektif perempuan dalam ruang publik digital dapat semakin terbatas. Situasi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas demokrasi digital karena partisipasi publik tidak berlangsung secara setara. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender online tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keberlanjutan ruang publik yang inklusif dan demokratis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam menangani kekerasan berbasis gender online. Upaya penanganan tidak hanya membutuhkan regulasi hukum yang kuat, tetapi juga peningkatan literasi digital serta kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender. Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan mekanisme moderasi konten yang lebih efektif untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan pelecehan digital. Selain itu, dukungan institusional terhadap korban juga perlu diperkuat agar mereka memiliki akses terhadap perlindungan hukum dan pemulihan psikologis. Dengan adanya sinergi antara kebijakan publik, edukasi digital, dan tanggung jawab platform teknologi, diharapkan ruang digital dapat berkembang menjadi ruang publik yang lebih aman, inklusif, dan setara bagi semua kelompok masyarakat.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Secara

khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritik konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Bimbingan dan dukungan akademik yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperdalam pemahaman terhadap topik penelitian serta dalam menyusun kerangka analisis yang lebih sistematis.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada institusi akademik yang telah memberikan fasilitas serta lingkungan akademik yang kondusif dalam proses penelitian ini. Selain itu, penulis turut mengapresiasi para peneliti dan akademisi yang karya-karyanya menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Kontribusi keilmuan dari berbagai penelitian sebelumnya sangat membantu dalam memperkaya perspektif teoritis maupun empiris yang digunakan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan tersebut menjadi motivasi penting bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan penelitian selanjutnya.

## Referensi

- Anggraini, L., et al (2025). EDUKASI KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) PADA REMAJA DI SMU 30 RAWASARI JAKARTA PERIODE MEI 2025. In *Jurnal Antara Pengmas* (Vol. 3, Issue 1).
- Arawinda, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. 24(02).  
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>
- Armando Sunaryo, Y., & Jatningsih, O. (2021). *PANDANGAN INTELEKTUAL TERHADAP WACANA KYAI PENDUKUNG KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2018* (Vol. 9).
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26–41.  
<https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Ashivah Misbah, N., Lintangdesi Afriani, A., Nidatya, N., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2025). *Online Gender-Based Violence Education for Teenagers at SMA 66 Jakarta Edukasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada Remaja di SMA 66 Jakarta*. 2(1), 10–19.
- Ayunda Pratiwi, M., Satriadi, D., Studi Manajemen, P., Pembangunan Tanjungpinang, S., & Korespondensi, P. (2021). Perceptions and Conditions of Gender-Based Violence Online on Female Workers in Indonesia Persepsi dan Kondisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada Pekerja Wanita di Indonesia. In *Dimas Satriadi Jurnal Masyarakat Maritim* (Issue 2). [www.trust.org](http://www.trust.org)
- Basanta, A. (2025). Karakteristik Korban dan Pelaku dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Purwokerto. *Soedirman Law Review*, 7(3), 205–227.  
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16125>

- Delisle, L., Kalaitzis, A., Majewski, K., de Berker, A., Marin, M., & Cornebise, J. (2019). *A large-scale crowdsourced analysis of abuse against women journalists and politicians on Twitter*. <http://arxiv.org/abs/1902.03093>
- Dian, S., Pratiwi, A., Qodariah, S., & Halimah, L. (n.d.). *Efektivitas Acceptance Commitment Therapy untuk Menurunkan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Bandung*.
- Eka Susilowati, N., Dewa Putu Wijana, I., & Cholsy, H. (2025). The Use of Verbal Violence Metaphors Toward Indonesian Female Politicians on X Social Media \*. *Jordan Journal of Modern Languages and Literatures*, 17(2), 485–507. <https://doi.org/10.47012/jjml>
- Elanda, Y., & Pitaloka, A. A. (2022). Pelakor Syar'i: Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan dalam Media Sosial. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 37–49. <https://doi.org/10.22146/jwk.5204>
- Fadiel Sastranegara, Rosmalinda, & Agusmidah. (2025). Konstruksi Sosial Kejahatan Siber: Analisis Teori Konstruktivisme Sosial Terhadap Proses Kriminalisasi dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 13189–13194. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3921>
- Ferza, M., Aldy, M., Sarwenda, M. A., Benedicta, F., & Citra Paramita, A. (n.d.). <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom> Analisis Wacana Kritis Perempuan Dalam Kontroversi KBGO Melalui Media Sosial instagram @emak\_moba. 03(02), 128–133. Retrieved <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom>
- Fidella Azhar Julian, & Wa Ode Asmawati. (2024). Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 33–44. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (n.d.). *Open Journal Systems GENDER BASED VIOLENCE: THE RELATIONSHIP OF LAW AND PATRIARCHY IN INDONESIA*. <https://doi.org/10.15408/empati>
- Handayani, L., Mahdalena, V., & Laura, R. B. (2025). *Dinamika Gender dalam Ruang Maya* (Vol. 8, Issue 2).
- Hidayati, A., Hasfi, N., Studi, P. S., & Komunikasi, I. (n.d.). *FRAMING PEMBERITAAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DI MEDIA ONLINE*.
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Juniarni, L., Mulia, S., Muzhaffar, H., & Tinggi Ilmu Keperawatan STIkep PPNI Jawa, S. (2025). *PSYCHOLOGICAL SUPPORT AND EMPATY THERAPI MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNTUK MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) PADA REMAJA DI SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA BANDUNG, JAWA BARAT*. 2. <https://doi.org/10.33755/jas>
- Kasih Pratiwi, R. I., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2023). Online Gender Based Violence Against Women. *Journal of Development Research*, 7(1), 176–186. <https://doi.org/10.28926/jdr.v7i1.229>

- Kurnia, N., & Hidayatullah, M. T. (2024). Ibu(isme) dan Film Orde Baru: Representasi Ibu dalam film Jangan Menangis Mama. *Jurnal Komunikasi*, 18(2), 207–228.  
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art6>
- Latuheru, R., & Fransisca, I. (2023). ANALISIS SEMIOTIKA PERSONAL BRANDING POLITISI PEREMPUAN DI MEDIA MAINSTREAM DAN MEDIA SOSIAL. In *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora* (Vol. 5, Issue 2).
- Lismini, R. (2023). ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE (KBGO) ETHNOGRAPHY STUDY ON TWITTER. *Syntax Admiration*, 4(5), 623.
- Maya yang Berbahaya, R., Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online, M., & Dhiah Indriani, L. (n.d.). 65 *Prosiding Semnaskom Digital 2024 The Dangerous of Digital Space: Explaining the Online Gender-Based Violence (OGBV) Case "Bernadya" on Social Media. Mengonstruksi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai Kekerasan dan Kejahatan Luar Biasa di Indonesia*. (n.d.). Retrieved <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/>
- Moulita, Mazdalifah, & Lubis, F. W. (2023). KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DI KOTA MEDAN. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 9(2), 101–110. <https://doi.org/10.31289/symbolika.v9i2.10063>
- Muhamad Ichsan Tawakal, & Dian Andriasari. (2025). Kajian Viktimologi Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo) Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2).  
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18490>
- Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia. *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>
- Munawwarah, S. (n.d.). *Kekerasan Berbasis di Era Digital : Tantangan Baru Bagi Perempuan*. Retrieved <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Mustika, S., Corliana, T., Tiara, A., & Amir, Y. (2023). Penguatan Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Bagi Guru-Guru SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Selatan. *Warta LPM*, 68–74. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i1.800>
- Nyoman Muryatini, N. (2024). Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2).  
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.969-976>
- Puspasari, C., Darnila, E., Siregar, W. V., Husniati, A. M., & Mardhiah, A. (n.d.). *Pencegahan KBGO Guna Membangun Ruang Aman Digital Bagi Anak & Perempuan Muslim di Era Society 5.0*.
- Queenta Napeladiar, L., & Rosalia, N. (n.d.). Analisis Penyebaran Informasi Terkait KBGO Pada Akun Instagram Awaskbgo Analysis of Information Dissemination on Online Gender-Based Violence (OGBV) through the Instagram Account @awaskbgo. In *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* (Vol. 4).
- Rahadian, D., Indriasari, E., & Setyawati Kurniawan, L. (2025). A Study of Legal Protection for Victims of Gender A Study of Legal Protection for Victims of Gender-Based Violence in Digital Spaces from a Human Rights Perspective. In *Jurnal Daulat Hukum* (Vol. 8, Issue 4).

- Ruslinia, A., Alfa, A. A., & Triantama, F. (2023). Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 178. <https://doi.org/10.22146/jkn.86516>
- Safela, A. W., Mahmud, H., & Dewi, N. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DITINJAU DARI UU ITE *Legal Protection for Victims of Online Gender-Based Violence (OGBV) Reviewed in Terms of the ITE Law*.
- Samosir, C. P. (n.d.). *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share*.
- Siti Fatimah, Aisyah Rukmi Widowati, & Azahery Insan Kamil. (2025). Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berekspresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 599–616. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19151>
- Susilo, D., Sugihartati, R., & Ariani Arimbi, D. (n.d.). *Indonesian Women in Politics: Critical Analysis of Portrayal in Online News Sites*.
- Tazkia Nazdifa Assyahida. (2025). Disinformasi Pemilu Digital sebagai Ancaman Transnasional: Implikasi terhadap Kedaulatan Demokrasi Indonesia. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(3), 97–106. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.1951>